CASCADING PERUBAHAN BIRO PBJ SETDA PROV. KALBAR

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	2024	Target Kinerja Tujuan / Sasaran						Definisi Operasional	Formula Pengukuran				Strategi	Kebijakan	Kode	Program Kegiatan sub kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, sub kegiatan (Outcome, Output)	Indikator Sasaran Program, Kegiatan, sub kegiatan	Formula Pengukuran	Data/ Capaian Renstra OPD dan Perubahan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			Penanggung jawab	Ket	Cross Cutting
				2025	2026	2027	2028	2029	2030												2025		2026		2027		2028		2029		2030						
				(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)												(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)												(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		WILAH SAKIP	79.80	79.64	80	82.66	84	85	84																											
	Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah	83 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)	81 (Sangat Baik)	83 (Sangat Baik)	85 (Sangat Baik)	86 (Sangat Baik)	Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kualitas dan efektifitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah, Sumber Data Nasional, Sumber Data Kementerian, mewasdan-dan tergi Kalbar pengadaan (Biro Adm Kalbar) Kepala LKPP RI No.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Indeks Reformasi Birokrasi.	IKP = Nilai EKIP * Nilai E-Katalog +Nilai Non-E-Tendering/Non-E-Purchasing + Nilai E-Tendering +Nilai Tata Daring + Nilai E-Kontrak + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDMPBJ + Nilai Reputasi Kemenerapan UKPBJ Interval Predikat Indeks Tata Kelola Pengadaan Batas Interval Predikat 				Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Pemerintah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Mengelolaan UKPBJ Provinsi Sebagai Koordinator (Center of Excellence) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	A.01.07	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemenuhan Sistem Pengadaan	Nilai Capaian Pemenuhan Sistem Pengadaan Nilai Evaluasi Sistem Pengadaan barang /Jasa SV 5: Tendering (nilai SV 5= Nilai e Tendering/Nilai e Purchasing (nilai SV 4=Nilai E-Katalok (nilai 1)	80%	24,8	381.113.750	24,8	650.000.000	24,8	650.000.000	24,8	950.000.000	24,8	1.100.000.000	24,8	1.100.000.000	Biro PBJ Setda Prov. Kalbar	01	Stakeholder : 1) LKPP (Insane Indo) terkaitpat Pecat Point dalam regulasi yang terkait dengan PBJP 2. Lembaga Pengawasan dan Pengadaan Aduan seperti KPK, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, BPK, BPKP, dan Inspektorat yang memiliki kepentingan dengan Biro PBJ Setda Prov. Kalbar terkait dengan upaya penanganan pemimpinpegan dalam. proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pemungkinan lengsan mgasa dan terkait evaluasi MEP KPK. 3. Kementerian Pendayagunaan Dyanetur Telegara dan Reformasi Birokasi (PANRB) yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik,pelitreutnuhche apasatur dan pemungkinan pengadopsiasan kewenangan 4. Kementerian Dalam Negeri 5. BAGO (Pemerintah ap data pemrumusan anggaran dan pemelevaluasian kewangan.) 6. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang menjadi fokus pemrimnasan terkait dengan pelaksanaan PBJP di Pemerintah Provinsi.Kab/Kota. 7. Pengelola Barang/Jasa Pemerintah (Sebagai mitra Pemerintah dalam pengadaan mata Pengelola barang/jasa pemerintah memkmutkan pelrabaan yang adil, pemangan-sehat, serta memicliti aliens untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional.	Biro PBJ Setda Prov. Kalbar	
				Indikator	Bobot	Kriteria Penilaian	Formula Penilaian																														

| | | |